

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA AKHIR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoretis	21
G. Metode Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum	36
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	36
2. Landasan Pemilihan Umum	43

3. Asas-asas dalam Pemilihan Umum	52
4. Dasar Hukum Pemilihan Umum	59
5. Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum	64
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Legislatif	75
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	75
2. Kedudukan DPRD Provinsi.....	80
3. DPRD Kabupaten/Kota	85
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	89
1. Sejarah Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi	89
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	90
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	93
4. Jenis-Jenis dan Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi	95
D. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam	117
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	128
A. Implementasi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah.....	128
B. Implementasi Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mewujudkan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Legislatif di Daerah Provinsi.....	210
BAB IV PENUTUP	247
A. Simpulan.....	247
B. Saran.....	248
DAFTAR PUSTAKA	250